

**Judul** : Digitalisasi perbankan, komisi XI soroti data nasabah  
**Tanggal** : Selasa, 23 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

## Digitalisasi Perbankan

# Komisi XI Soroti Data Nasabah

FOTO IG: PIRABADI



Amin Ak

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Ak berharap percepatan digitalisasi sektor keuangan harus dibarengi dengan sistem pengamanan yang memadai. Dana dan data pribadi nasabah perbankan wajib terlindungi dari berbagai kasus penipuan keuangan.

Dia merujuk kasus penipuan sistem pembayaran BI-Fast dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar. Kasus itu diduga melibatkan jaringan kriminal terorganisir dan berujung pada praktik pencucian uang melalui aset kripto.

Amin menilai, peristiwa ini jadi sinyal penting bahwa aspek keamanan yang jadi hak dasar nasabah wajib menjadi prioritas. "Masyarakat harus merasa aman menyimpan uang dan data pribadinya di bank," ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan, kejahatan yang memanfaatkan sistem itu tidak lagi bersifat insidental, melainkan sudah terstruktur dan dijalankan secara sistematis. Modus kejahatan umumnya diawali dengan penipuan digital terhadap korban, kemudian dana dipindah-

kan dengan cepat ke sejumlah rekening penampung melalui BI-Fast. "Selanjutnya dana itu dikonversi ke aset kripto untuk menyamarkan jejak transaksi," ungkapnya.

Menurut Amin, karakter BI-Fast yang beroperasi secara *real-time* dan tanpa batas waktu membuat dana korban dapat berpindah lintas bank dalam hitungan menit. Kondisi ini kerap menyulitkan upaya pemblokiran dana jika tidak didukung sistem pengawasan yang responsif dan berbasis risiko.

"Ketika transaksi bisa dilakukan 24 jam, sementara pengawasan masih konvensional, celah kejahatan terbuka lebar. Ini yang harus segera dibenahi," tegasnya.

Untuk itu, dia mengingatkan, harus ada kolaborasi lebih erat antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta penyelenggara perdagangan aset kripto. Sinergi antarlembaga dinilai krusial mencegah praktik pencucian uang yang memanfaatkan celah antar-sektor pengawasan.

"Tidak cukup hanya mengesjar kecepatan transaksi, sistem keuangan harus dirancang agar mampu melindungi masyarakat dari risiko kejahatan digital yang semakin kompleks," tandas legislator asal Dapil Jatim IV itu.

Dia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku penipuan dan jaringan pencucian uang. Langkah ini penting tidak hanya untuk memberikan efek jera, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan dan sistem keuangan nasional. ■ PVB